



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



## BLUE ABADI FUND NEWS

Bi-Monthly Update Vol. 11, Januari – Februari 2020

### PERTEMUAN BAF GOVERNANCE COMMITTEE

Pada tanggal **30 Januari 2020** telah dilaksanakan Pertemuan BAF Governance Committee ke-7 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh 7 anggota GC, 4 anggota SCAC, 2 anggota LRC, 1 anggota IAC, administrator, undangan observers yaitu KKP, CI, TNC, Nia Tero, Starling Resources, dan LPPM UNIPA.



Pertemuan GC ke-6 dipimpin oleh Bp. Gellwynn Yusuf

Terkait tata kelola, agenda utama pertemuan ini penyampaian bahwa Ketua GC, Bp. Gellwynn Yusuf, yang juga perwakilan Pemerintah Pusat untuk BAF telah ditunjuk menjadi Staf Khusus di KKP. Hal ini merupakan kesempatan baik untuk BAF membangun dukungan & rasa kepemilikan KKP, dengan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan BAPPENAS. Pada pertemuan ini juga diperkenalkan anggota LRC yang baru, yaitu Ibu Frida T. Kelasin, yang akan memperkaya

perspektif gender pada program hibah BAF. Donor baru BAF, Nia Tero, juga diperkenalkan sebagai lembaga yang memiliki kesamaan pandang dengan BAF terkait dukungan untuk masyarakat adat. Selanjutnya, menindaklanjuti keputusan rapat GC sebelumnya, GC bersepakat untuk mengangkat kembali Bp. Lukas Rumetna sebagai perwakilan bersama TNC/WWF-ID untuk GC BAF.

Agenda utama pertemuan GC ini adalah persetujuan GC terkait perpanjangan dengan penambahan dana hibah untuk beberapa mitra hibah BAF siklus-2, pembahasan revisi Rencana Bisnis BAF, serta diskusi strategi dan target Penggalangan Dana BAF.

Pada pertemuan ini Administrator menyampaikan kemajuan pelaksanaan hibah BAF siklus-2 dan update terkait beberapa tantangan kerjasama yang dihadapi, serta mempresentasikan revisi Rencana Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran (MEL Plan) BAF dan Strategi Komunikasi BAF. Finalisasi dokumen ini akan ditindaklanjuti oleh tim kecil GC. Pertemuan GC selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan pada akhir Juli 2020.



Peserta Pertemuan GC BAF ke-7 di Jakarta

## AMENDEMENT HIBAH SIKLUS-2

Menindaklanjuti keputusan Rapat GC ke-7 terkait perpanjangan waktu kerjasama, yaitu sampai dengan 30 April 2020 dan penambahan dana hibah untuk beberapa mitra hibah BAF siklus-2, pada **awal Februari 2020** Administrator melakukan proses amendemen perjanjian hibah.

Amendemen kontrak perpanjangan dan penambahan dana hibah telah ditandatangani oleh 3 mitra hibah Primary yaitu:

- (1) Yayasan Nazaret Papua (YNP),
- (2) Yayasan Penyu Papua (YPP) dan
- (3) BLUD UPTD KKPD Kep. Raja Ampat,

serta 3 mitra hibah kecil Inovasi yaitu:

- (1) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Raja Ampat,

- (2) Konsorsium Mitra Bahari (KMB) Papua Barat, dan
- (3) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nusa Matan.

Amendemen perpanjangan tanpa penambahan dana hibah juga telah ditandatangani oleh 2 mitra hibah Primary, yaitu:

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIPA, dan
- (2) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNIPA.

Per akhir Februari 2020, pelaksanaan kegiatan telah berakhir untuk 1 mitra hibah Primary, yaitu Yayasan Misool Baseftin (YMB), sementara 8 mitra hibah Inovasi dalam proses penyusunan pelaporan akhir.

## PENDAMPINGAN YPP GUNA PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU OLEH MASYARAKAT KP. YENBEKAKI

Melalui mekanisme hibah primary, Yayasan Penyu Papua (YPP) melakukan pendampingan pengelolaan program konservasi penyu yang dilakukan oleh Kelompok Kumep di Kampung Yenbekaki, Raja Ampat.

Pertemuan awal guna membahas program pendampingan pendataan penyu di Pantai Warebar, Kampung Yenbekaki telah dilaksanakan pada tanggal **30 Januari 2020**. Pertemuan ini dihadiri oleh YPP, Kelompok Kumep, Pemerintah Kampung Yenbekaki serta masyarakat. Pemerintah kampung dan masyarakat sangat mendukung kegiatan pendampingan pendataan penyu ini dan berharap kelompok Kumep dapat belajar dengan sungguh-sungguh dari pendampingan YPP.



Ketua YPP, Pak Ferdiel Balamu, menyampaikan program pendampingan YPP

Selanjutnya, Pemerintah Kampung Yenbekaki juga berharap ke depannya semua pantai peneluran penyu yang ada di kampung Yenbekaki bisa dijaga/diawasi dengan baik.

## LOKAKARYA EVALUASI E-KKP3K DI BLKB PAPUA BARAT



Peserta Workshop E-KKP3K

Penilaian efektifitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh KKP dengan dukungan berbagai pihak, dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut dengan E-KKP3K.

Pada tanggal **27-29 Januari 2020**, DKP Provinsi Papua Barat bersama para mitra pendukungnya, termasuk BAF, menyelenggarakan Lokakarya Evaluasi EKKP3K untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Bentang Laut Kepala Burung, Papua Barat.

Lokakarya mulai dengan penjelasan umum mengenai EKKP3K dan penyampaian informasi dari lapangan mengenai capaian dan tantangan pengelola kawasan konservasi. Selanjutnya, peserta lokakarya melakukan kerja kelompok untuk mengevaluasi skor EKKP3K masing-masing kawasan konservasi yang disertai dengan penyampaian presentasi dan diskusi hasil evaluasi tiap kawasan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, BLUD UPTD KKPD Kep. Raja Ampat, BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, UPTD TP Jeen Womom, Tambraw, Balai Besar TNTC, LPPM Universitas Papua, Yayasan Nazareth Papua (YNP), RARE, dan CI Indonesia.

Narasumber lokakarya ini adalah perwakilan loka PSPL Sorong, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yang memberikan presentasi terhadap proses penilaian E-KKP3K sekaligus melakukan verifikasi terhadap E-KKP3K yang dihasilkan dari masing-masing kawasan konservasi. Berikut adalah hasil penilaian efektifitas pengelolaan kawasan:

Kawasan Konservasi	Peringkat Efektivitas Pengelolaan (%)				
	Merah	Kuning	Hijau	Biru	Emas
TN Teluk Cenderawasih	100	100	100	100	67
SAP Kep. Waigeo Barat	100	100	100	63	17
SAP Kep. Raja Ampat	100	100	100	58	17
KKPD Kep. Raja Ampat	100	100	100	79	67
TP Jeen Womom, Tambrauw	100	100	81	48	0
KKPD Kaimana	100	100	100	68	67
KKPD Fakfak	100	100	90	46	17
KKPD Sorong Selatan*	100	23	10	27	0
CKKP Maksegara	88	0	0	0	0
CKKP Misool Utara	56	9	0	0	0

## PROGRAM PENGAWASAN DI KKPA MISOOL UTARA

Misool Utara merupakan Kawasan Konservasi Perairan baru yang dideklarasikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat adat suku Matbat dan matlau bersama dengan Dewan Adat Suku Maya dan didukung oleh Pemerintah Daerah pada 27 Maret 2018. Deklarasi menyepakati bahwa wilayah perairan Misool Pantai Utara seluas 315.477 Ha yang meliputi 5 Kampung di Distrik Misool Utara dan 4 Kampung di Distrik Misool Timur sebagai Kawasan Konservasi Perairan Adat (KKPA).

Untuk mulai melakukan proses pengelolaan kawasan konservasi ini, diperlukan sebuah sistem pengawasan yang kuat yang melibatkan masyarakat adat dan aparat penegak hukum, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Untuk itu, dengan dukungan CI, pada tanggal **3 Februari 2020**, dilakukan pelatihan dan pembuatan SOP Patroli untuk Tim Patroli/Pengawasan Misool Utara beserta SOP Penggunaan Speedboat dan penggunaan BBM.



Peserta Pelatihan Penyusunan SOP

Selanjutnya pada tanggal **11 Februari 2020**, Tim YNP didampingi staf CI Sorong melakukan pertemuan internal untuk mengatur teknis pelaksanaan patroli masyarakat di Misool Utara.

Dalam pertemuan ini diputuskan bahwa kegiatan patroli/pengawasan masyarakat di Misool Utara dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah pertama, dengan basis baru di kampung Foley, patroli/pengawasan masyarakat akan meliputi 4 kampung yaitu Foley, Audam, Limalas dan Atkari. Sedangkan wilayah kedua, dengan basis patroli yang sudah ada sebelumnya di Pos Patroli Tanjung Kasim, patroli/pengawasan masyarakat akan meliputi 4 kampung lainnya, yaitu Solal, Salafen, Waigama, dan Aduwei.



Pertemuan Internal YNP

Pada pertemuan ini disepakati bahwa masing-masing wilayah akan melakukan kegiatan patroli sebanyak 8 kali per bulan, atau total 16 kali per bulan untuk keseluruhan wilayah Misool Utara.

## PELATIHAN ANALISA DAMPAK KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI BLKB



Tim UNIPA dipimpin oleh Koordinator Program, Ibu Fitri Pakiding berdiskusi dengan narasumber Duke University

Dalam proses penyelesaian laporan State of The BHS Seascapes (SoTS) Report 2019, salah satu

kendala tim LPPM UNIPA adalah kemampuan untuk melakukan analisis dampak (*impact analysis*) dari hasil monitoring ekologi dan sosial-ekonomi yang selama ini dilakukan oleh LPPM UNIPA di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Bentang Laut Kepala Burung.

Melalui fasilitas dana hibah yang diberikan melalui CI, WWF-US dan BAF, Tim LPPM UNIPA dapat menerima pelatihan analisa dampak kawasan konservasi di Washington DC pada **minggu pertama Februari 2020**. Narasumber pelatihan merupakan tim kolaborasi dari Duke University, WWF-US, dan CI.

## SELEKSI & PELATIHAN PENDAMPING MASYARAKAT GUNA Mendukung PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAB. TAMBRAW

Dalam rangka meningkatkan efektifitas program pemberdayaan masyarakat di Kab. Tambraw yang dilaksanakan oleh LPPM UNIPA, telah dilakukan kegiatan perekrutan dan pelatihan tenaga pendamping masyarakat.

Setelah melalui selesi administrasi dan wawancara, tim LPPM UNIPA berhasil mendapatkan 14 calon pendamping masyarakat untuk mendapatkan pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu **11-13 Februari 2020**, diikuti oleh 17 orang peserta yang terdiri dari 14 calon pendamping masyarakat hasil seleksi dan 3 pendamping yang melanjutkan kontrak.



Praktek pembuatan minyak kelapa

Pelatihan yang dibuka oleh Sekretaris LPPM UNIPA memberikan 3 materi dasar sebagai berikut:

- Cara Mengajar Bahasa Inggris untuk SD dan PAUD oleh Ibu Imelda Malippa, M.Pd.

- Praktik cara membaca, menulis, dan berhitung oleh ibu Rium Hilum, S.Pd.
- Pembuatan Minyak Kelapa yang bersih oleh Ibu Sritina Paiki, M.Si.

Setelah 3 hari pembekalan, kegiatan pelatihan ini ditutup oleh Wakil Dekan Fateta UNIPA.



Peserta Pelatihan bersama Wakil Dekan Fateta UNIPA

Sebagai catatan, wilayah Tambraw memiliki sumber minyak kelapa sangat potensial, namun pengolahan mintak kelapa hanya terbatas bagi penggunaan rumah tangga. LPPM UNIPA sejak hibah BAF siklus-1 telah mendorong potensi ini di masyarakat. Inisiasi pengolahan minyak kelapa pada awalnya terkendala kualitas pengolahan/higienis dan distribusi. Namun, dengan diselenggarakannya pelatihan dan pendampingan di masyarakat yang konsisten pada hibah siklus -2 ini, masyarakat mulai dapat merasakan dampak ekonomis dari pengolahan minyak kelapa ini.

## DUKUNGAN DAS MAYA TERKAIT UPAYA KONSERVASI DI PULAU PIAY DAN SAYANG

Pulau Piay dan Pulau Sayang merupakan 2 pulau yang termasuk dalam Suaka Alam Perairan (SAP) di Waigeo Sebelah Barat. Kedua pulau ini merupakan pulau penting karena memiliki pantai peneluran penyu hijau (*Chelonia mydas*) di Raja Ampat. Namun, kedua pulau ini juga telah diklaim kepemilikannya oleh Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Bekerjasama dengan Dewan Adat Suku (DAS) Maya dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yayasan Penyu Papua (YPP) sebagai penerima dana hibah BAF Primary menyelenggarakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tujuan membahas penyelesaian masalah status kepemilikan Pulau Piay dan Sayang yang juga diklaim oleh Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal **12 Februari 2020**, di ruang pertemuan Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat di Manokwari, dihadiri langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, perwakilan MRPB, perwakilan DAS Maya serta perwakilan adat suku Kawe. Pertemuan ini juga memfasilitasi penyampaian hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan DAS Maya

bersama suku Kawe, sebagai pemilik hak adat atas Pulau Piay dan Pulau Sayang.

Pada pertemuan ini disepakati bahwa permasalahan klaim Pulau Piay dan Pulau Sayang akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Kementerian Dalam Negeri RI.



Peserta pertemuan pembahasan klaim Pulau Piay & Pulau Sayang oleh Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Biro Pemerintahan akan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan menghadirkan perwakilan dari masyarakat adat Kawe, serta menyurat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait pertemuan ini.

## SOSIALISASI PERKAM TP TELUK BERAU, FAKFAK

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nusa Matan yang dibentuk pada tahun 2018 bertujuan untuk melakukan pengawasan di wilayah Taman Pesisir (TP) Teluk Berau dan Taman Pesisir (TP) Teluk Nusalasi Van Den Bosch. Sebagai penerima dana hibah Inovasi BAF Siklus-2, Pokmaswas Nusa Matan menginisiasi terbitnya Peraturan Kampung (Perkam) untuk mendukung kegiatan pengawasan yang melibatkan masyarakat kampung serta petuanan/pemilik hak ulayat.

Untuk tujuan tersebut, Tim dari Pokmaswas Nusamatan melakukan Pertemuan Sosialisasi Penyusunan Perkam di kawasan TP Teluk Berau. Pertemuan Sosialisasi diselenggarakan pada tanggal **15 Februari 2020** di kampung Sekar, Distrik Kokas. Kegiatan ini melibatkan aparat dari Distrik Kokas, Distrik Arguni dan Distrik Mbahmdandara, serta juga melibatkan perwakilan dari 17 kampung, dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang.



Pertemuan Sosialisasi Perkam

Dari pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat dari 17 kampung menyepakati bahwa:

1. Peraturan Kampung (PERKAM) perlu segera disusun dan diterapkan.
2. Materi dalam Perkam secara umum sudah disepakati oleh peserta pertemuan
3. Hasil Penyempurnaan Draf Perkam harus segera disosialisasikan kembali pada minggu ketiga bulan Maret, untuk segera difinalisasi.

## PENGAWASAN KEPATUHAN PEMANFAAT KKPD KEPULAUAN RAJA AMPAT

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap para pemanfaat Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Raja Ampat seperti LoB, resort, homestay, dll, BLUD UPTD KKPD Kepulauan Raja Ampat melakukan sidak dan sosialisasi kepada para pemanfaat KKPD terkait Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (LPJL) atau yang bisa di kenal dengan Kartu Jasa Lingkungan (KJL) di KKPD Kepulauan Raja Ampat.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada bulan Januari – Februari 2020 dengan frekuensi 1-2 kali per bulan, yaitu 15 dan 22 Januari 2020 serta 3 Februari 2020. Dari hasil sidak yang dilakukan, didapati masih ada kapal-kapal yang tidak membayar KJL ketika melakukan aktivitas wisata bahari di dalam KKPD Kepulauan Raja Ampat. Dari hasil sidak ini, BLUD UPTD KKPD Kepulauan Raja Ampat menyimpulkan bahwa pelanggaran terjadi karena adanya informasi provokatif dari orang-

orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan pemahaman pelaku wisata dan mengarahkan pelaku wisata untuk tidak membayar KJL.



Kegiatan sidak para pemanfaat KKPD Raja Ampat oleh BLUD UPTD KKPD Kep. Raja Ampat

## SURVEI POTENSI EKOWISATA DI KKPA MISOOL UTARA

Sebagai upaya mendukung program konservasi yang dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Adat (KKPA) Misool Utara, Yayasan Nazareth Papua (YNP) berkolaborasi dengan Flora dan Fauna International (FFI) melakukan inisiasi kegiatan survey potensi ekowisata di KKPA Misool Utara.

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan Tim YNP dengan Paul Schreiber (konsultan FFI) pada tanggal 24 Februari 2020 di Kantor YNP Sorong. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menggali informasi mengenai:

- Potensi pariwisata di darat, hutan dan sungai di Misool Utara serta pulau-pulau sekitarnya,
- *Diving spot* di Misool Utara
- Budaya dan suku-suku di Misool utara, serta statistik populasi kependudukan
- Wilayah konservasi serta potensi zonasi

Pertemuan juga membahas persiapan survei ekowisata, termasuk aparat pemerintah dan tokoh masyarakat yang perlu ditemui. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa kegiatan survei potensi ekowisata ini akan dilaksanakan bersama oleh FFI dan YNP dengan melibatkan tim lapangan dari YNP serta masyarakat lokal.



Persiapan survei potensi ekowisata oleh YNP dan FFI

Selanjutnya, konsultan FFI didampingi oleh 3 orang staf YNP berangkat ke lokasi pada tanggal 26 Februari 2020.

Hasil survei potensi ekowisata di KKPA Misool Utara (berkolaborasi dengan FFI) dan survey *Marine Rapid Assesment* (MRAP) untuk mengetahui kondisi biofisik dan sosial ekonomi di KKPA Misool Utara (bekerjasama dengan CI) menjadi salah satu capaian kunci YNP yang akan disampaikan bersama Laporan Akhir BAF siklus-2.

## DUKUNGAN PROSES LEGALITAS HUKUM KKPA MISOOL UTARA

Sebagai calon Kawasan Konservasi baru, Misool Utara perlu mendapatkan legalitas hukum yang jelas dari Pemerintah baik Daerah maupun Nasional melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempersiapkan proses legalitas hukum KKPA Misool Utara, Yayasan Nazareth Papua (YNP) menginisiasi diskusi bersama CI pada tanggal 25 Februari 2020 di Kantor YNP Sorong. Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan YNP dan 4 staff CI Sorong bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan menuju proses penetapan KKPA Misool Utara.



Diskusi terkait proses dan tahapan menuju penetapan KKPA Misool Utara

Beberapa hal yang dibahas serta disepakati dalam diskusi ini antara lain:

- KKPA Misool Utara akan bergabung dengan KKPD Kepulauan Raja Ampat dan tidak akan berdiri sendiri sebagai KKPD yang terpisah.
- Proses pencadangan KKPA Misool Utara tidak perlu dilakukan karena KKPA Misool Utara sudah masuk dalam alokasi ruang dalam RZWP3K Papua Barat.
- Melakukan komunikasi intensif dengan DKP Papua Barat, untuk melakukan pertemuan koordinasi/FGD dengan tujuan untuk sosialisasi/update dari kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan di Misool Utara, serta membahas pembentukan Pokja untuk penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan tertulis dari masyarakat serta adat terkait dengan usulan dan penetapan KKPA Misool Utara.
- CI berkomitmen membantu YNP dalam proses legalitas hukum/penetapan KKPA Misool Utara.